

KEBIJAKAN EKONOMI INDUSTRI AGRIBISNIS SAPI PERAH DI INDONESIA

Yusmichad Yusdja

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki prospek pengembangan industri sapi perah yang relatif besar untuk menciptakan negeri ini sebagai kolam susu. Pertama dilihat dari permintaan potensial susu oleh 250 juta penduduk, permintaan efektif yang terus berkembang sesuai dengan pertumbuhan perekonomian. Saat ini, produksi sangat rendah baru mencapai 30 kebutuhan permintaan efektif. Dari sisi produksi, Indonesia memiliki padang-padang penggembalaan dan produksi hijauan yang berlimpah dan sebagian besar tidak digunakan sepanjang tahun. Dari sisi kemampuan finansial baik untuk swasta maupun usaha rakyat tersedia relatif hanya informasi tidak memasyarakat. Salah satu kelemahan kita adalah belum menguasai kemampuan manajemen dan teknologi sapi perah, namun hal itu dapat diatasi melalui impor. Jika demikian mengapa industri sapi perah berkembang sangat lambat?

Perkembangan peningkatan produksi sapi perah hingga tahun 1999 kental dengan campur tangan pemerintah baik dalam pengaturan pemasaran, tataniaga, impor sapi perah, memaksa IPS membeli susu segar koperasi dengan mengkaitkan ijin impor susu dengan penyerapan susu segar koperasi¹. Selama hampir 30 tahun di bawah kendali pemerintah, ternyata telah menghasilkan keragaan industri yang semakin tidak tangguh. Usaha peternak rakyat tidak menguntungkan dan tidak mungkin berkembang sedangkan usaha swasta semakin menciut. Bagaimana caranya, supaya Indonesia sebagai kolam susu?

Tujuan penulisan makalah ini adalah melakukan analisis ekonomi mikro tentang permasalahan industri agribisnis sapi perah di Indonesia sehubungan dengan niat kita untuk menciptakan Indonesia sebagai kolam susu. Makalah ini akan mencoba mengulas, apakah kita bermimpi atukah target itu memang rasional? Makalah ini juga mencoba menghimpun permasalahan sapi perah pada tingkat agribisnis secara menyeluruh. Tujuan berikut dari makalah ini adalah memberikan saran baik bersifat normatif maupun dalam bentuk konkrit yang secara teknis dapat dilakukan.

¹ Hutabarat B., Y. Yusdja, B. Sayaka dan M. Iqbal. 1997. Indonesian Dairy Industry Facing the Challenge from Global Competitive Market. Paper presented as material for Workshop at Center for Agro-Economic Research (CASER)/Bogor.

INDUSTRI SAPI PERAH DI INDONESIA

Industri sapi perah di Indonesia mempunyai struktur yang relatif lengkap yakni peternak, pabrik pakan dan pabrik pengolahan susu yang relatif maju dan kapasitas yang cukup tinggi, dan tersedia kelembagaan peternak yakni GKSI (Gabungan Koperasi Susu Indonesia). Kelengkapan ini dimungkinkan sebagai akibat kebijakan penanaman modal asing atau PMA dan kebijakan perkoperasian. Sementara struktur produksi susu sapi perah terdiri atas usaha skala besar, UB (lebih dari 100 ekor), usaha menengah, UM (30-100 ekor), usaha kecil, UK (10-30 ekor) dan usaha rakyat, UR (1-9 ekor). UR pada umumnya merupakan anggota koperasi. UK berkembang di Sumatera Utara, sedangkan UB dan UM berkembang di Pulau Jawa. Situasi kontribusi produksi susu sekarang adalah US, UM, UK dan UR masing-masing 1, 5, 7 dan 90 persen. Selanjutnya kelompok US, UM dan UK disebut sebagai usaha swasta atau US.

Konsep Kebijakan Pemerintah

Sebenarnya, usaha sapi perah telah berkembang sejak tahun 1960 ditandai dengan pembangunan usaha-usaha swasta dalam usaha sapi perah di sekitar Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mulai tahun 1977, Indonesia mulai mengembangkan agribisnis sapi perah rakyat ditandai dengan SKB Tiga Menteri². SKB ini merumuskan kebijakan dan program pengembangan agribisnis sapi perah di Indonesia. Paling tidak ada dua dasar yang digunakan yakni agribisnis sapi perah dikembangkan melalui koperasi/KUD sapi perah dan pemasaran susu diatur oleh koperasi dan IPS. Dalam SKB itu sama sekali tidak menyinggung usaha sapi perah swasta. Mereka terabaikan.

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penyediaan lapangan usaha yakni beternak sapi perah. Untuk itu, koperasi (pembentukannya bersifat kebijakan *top-down*) mendapat dana untuk mengerahkan koperasi antara lain dalam bentuk pengadaan bibit sapi perah impor untuk dibagikan kepada anggota sebagai pinjaman. Karena anggota koperasi relatif besar sampai 60 ribu lebih maka pemilikan ternak sapi perah dialokasikan dalam ukuran kecil yakni 1 sampai 3 ekor. Peternak harus mengembalikan pinjaman melalui hasil susu dan harus mengikuti semua aturan-aturan koperasi. Koperasi menjamin menampung semua produksi susu sapi perah anggota dan dipasarkan ke industri pengolahan susu (IPS). Pemerintah menjamin bahwa IPS dapat dipaksa membeli hasil susu koperasi dengan berbagai ancaman dan kemudahan.

Konsep ini melahirkan pertanyaan apakah yang dikembangkan itu koperasi atau usaha peternakan sapi perah? Sebagaimana telah dibahas bahwa dua kunci pengembangan yang digunakan adalah koperasi dan pengaturan pasar.

² SKB Tiga Menteri 1982, yakni Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian.

Bagaimana strategi pengembangan produksi bukanlah bagian yang penting. Hal ini diperlihatkan oleh kriteria keberhasilan koperasi yakni keberhasilan menumpuk modal, jumlah anggota yang banyak dan keberhasilan usaha. Memang semakin banyak anggota semakin tinggi produksi susu dan semakin banyak pendapatan koperasi baik melalui simpanan, iuran anggota dan penjualan susu. Semakin banyak anggota memperlihatkan semakin banyak anggota masyarakat yang ditingkatkan kesejahteraannya. Apakah koperasi sebuah perusahaan bisnis atau sosial? Pertanyaan ini akan terjawab dalam diskusi mendatang.

Situasi kini industri sapi perah di Indonesia merupakan dampak dari kebijakan pada masa lalu. Oleh karena itu untuk melakukan perbaikan apa yang sudah ada adalah dengan memahami kebijakan masa lalu sehingga dapat memahami apakah bentuk industri yang ada sekarang mempunyai struktur yang tangguh dan kita tinggal meneruskan atau kita harus membongkar pasang kembali?.

Perkembangan Usaha Swasta (US)

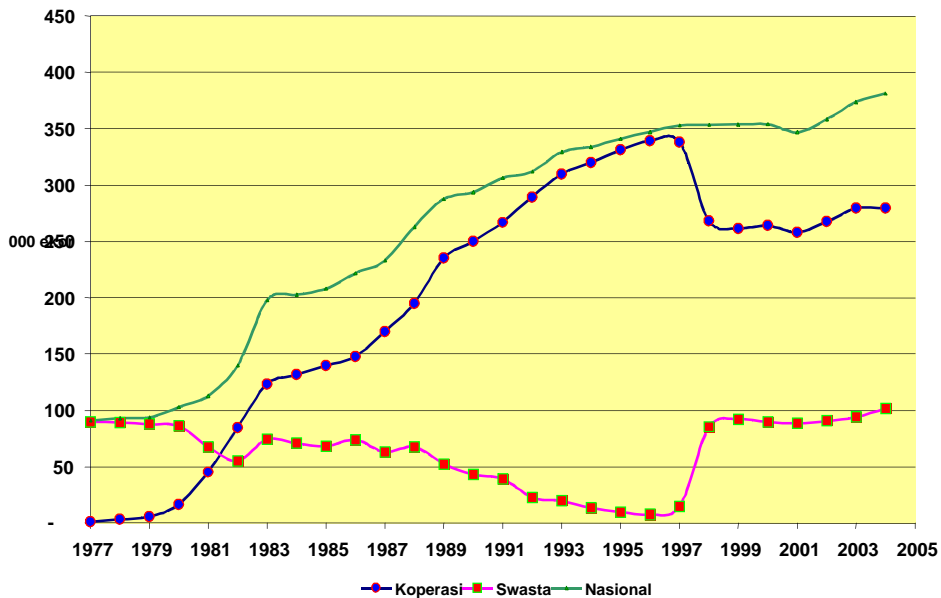
US merupakan pelopor usaha agribisnis susu di Indonesia, sejak tahun 1960. Karena kesulitan mendapatkan modal, melaksanakan manajemen yang baik, menghadapi resiko tinggi dan teknologi rendah menyebabkan US berkembang relatif lambat dibandingkan permintaan susu. Tahun 1976, ketika Indonesia membuka investasi pembangunan banyak industri melalui penanaman modal asing (PMA), di antaranya pembangunan beberapa pabrik susu olahan (IPS) dan pabrik pakan, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur. Namun sangat disayangkan bahwa kebijakan industri PMA tersebut tidak mempunyai keterkaitan ke belakang, yakni sektor input. IPS PMA ternyata mengimpor bahan susu dari negeri asalnya, sehingga modal PMA ini tidak mempunyai dampak positif terhadap perusahaan susu dalam negeri khususnya usaha swasta yang seharusnya mempunyai hubungan dengan IPS. Demikian juga dengan pabrik pakan kebutuhan bahan baku didatangkan dari impor sehingga tidak mendorong usaha-usaha butir-butiran dalam negeri.

Gambar 1 memperlihatkan perkembangan populasi sapi perah Nasional (yang dikembangkan oleh koperasi dan swasta) dan populasi sapi yang diusahakan oleh Swasta³. Tampak jelas bahwa perkembangan populasi nasional berhubungan negatif dengan perkembangan populasi sapi swasta. Paling tidak, data ini memperlihatkan kebijakan koperasi ternyata tidak mendorong perkembangan swasta.

Ketika impor sapi perah dilaksanakan pada tahun 1977 dan terus berlanjut sampai tahun 1996, populasi sapi nasional terus meningkat, namun populasi sapi swasta terus mengalami penurunan. Pada masa krisis ekonomi, populasi sapi perah nasional anjlok dan tumbuh stagnan sampai sekarang sedangkan populasi sapi

³ BPS. 2001. Statistik Perusahaan Peternakan Sapi Perah Tahun 1999, 2000 dan 2001. Jakarta.

perah swasta mengalami kebangkitan kembali. Sehingga timbul pertanyaan apakah kebijakan pemerintah yang turut kental mengatur pasar berpengaruh buruk pada pertumbuhan produksi susu swasta? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus memahami situasi dan perkembangan koperasi dan peternak anggota.



Gambar 1. Perkembangan Populasi Sapi Perah Koperasi dan Perusahaan Swasta, 1977-2005

Perkembangan Koperasi, UR dan Populasi

Perkembangan agribisnis sapi perah 10 tahun setelah SKB ternyata melonjak dengan cepat, berkat kebijakan-kebijakan pemerintah mengimpor sapi perah. Tetapi peningkatan produksi setelah 10 tahun tersebut mengalami peningkatan yang semakin lambat. Banyak masalah internal yang muncul. Kemudian pada tahun 1992 terjadi musim kering dan tahun 1996 krisis ekonomi yang memberikan tidak saja dampak pada kinerja koperasi yang semakin buruk tetapi juga koperasi tidak lagi dapat mengembangkan populasi.

Koperasi susu atau KUD sapi perah -selanjutnya kedua bentuk ini disebut dengan koperasi merupakan lembaga resmi pemerintah untuk penyaluran dana untuk kredit investasi untuk peternak dan penyaluran bibit sapi perah khususnya impor. Setiap peternak yang menjadi anggota koperasi praktis memperoleh kedua pelayanan tersebut. Kewajiban peternak anggota adalah wajib menjual seluruh produk susu segar kepada koperasi dengan harga yang ditetapkan oleh IPS dan koperasi. Koperasi telah mengangkat anggota peternak yang relatif miskin di daerah pedesaan, karena memang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan

kesempatan kerja. Karena kemiskinan dan pendidikan yang rendah maka mereka sulit berkembang.

Berdasarkan pengolahan data GKSI ternyata jumlah koperasi berkembang pesat dari Tahun 1977 sampai tahun 1990 dan setelah itu relatif stagnasi⁴. Populasi sapi perah Nasional tumbuh 2,33 persen per tahun, sedangkan populasi sapi swasta cenderung turun 3,15 persen per tahun sedangkan populasi sapi perah koperasi terus meningkat 5,97 persen per tahun. Angka-angka pertumbuhan ini memperlihatkan bahwa kemajuan perekonomian tidak merupakan insentif bagi pengusaha sapi perah swasta.

Tabel 1 memperlihatkan perkembangan koperasi susu 1995-2000 berdasarkan kelas. Kelas A: produksi susu per hari >40.000 kg. Untuk kelas B, C, D dan E masing-masing produksi susu 20-40 ribu, 10-20 ribu, 5-10 ribu dan <5000 kg. Tabel 1 memperlihatkan bahwa semakin kecil kemampuan koperasi semakin banyak jumlah koperasi pada kelas tersebut. Hanya sekitar 6 persen koperasi berada dalam kelas A dan 4 persen di kelas B, sehingga sebagian besar 90 persen koperasi berukuran relatif kecil. Setelah 5 tahun, 1995-2000, keadaan itu tidak berubah.

Tabel 1. Perkembangan Koperasi Susu Berdasarkan Kelas, 1995-2000

Kelas	Jml Koperasi	Peternak (org)	Ternak SP (ek)	Susu (kg)	Peternak (org)	Ternak SP (ek)	Susu (kg)
A	6	18.862	77.020	390.835	21.110	79.490	357.407
B	4	11.842	30.753	111.296	13.044	33.477	102.237
C	17	20.647	55.500	167.404	17.041	61.812	217.984
D	16	11.801	29.250	102.109	9.801	41.241	111.055
E	57	15.080	39.393	120.663	12.036	41.942	93.491
Total	100	78.232	231.916	892.307	73.032	257.962	882.174

Sumber: GKSI (2000) data diolah.

Jumlah peternak yang bergabung dalam koperasi relatif besar. Dari jumlah 296 orang pada tahun 1977 berkembang menjadi hampir 86 ribu peternak pada tahun 2002. Pertumbuhan jumlah peternak ini memang fantastis yakni 31,4 persen per tahun (Tabel 2), sementara jumlah koperasi hanya meningkat 3,6 persen per tahun. Peningkatan jumlah peternak ini sejalan dengan kucuran kredit baru kepada peternak baru dengan skala usaha yang relatif kecil yakni 1-3 ekor.

Hal menarik lainnya adalah bahwa jumlah pegawai yang bekerja di koperasi juga relatif besar yakni sekitar 20 persen dari jumlah peternak. Jumlah pegawai meningkat dengan semakin meningkat jumlah peternak. Jelas bahwa jumlah pegawai yang bekerja di koperasi tidak rasional, terlalu banyak pemborosan.

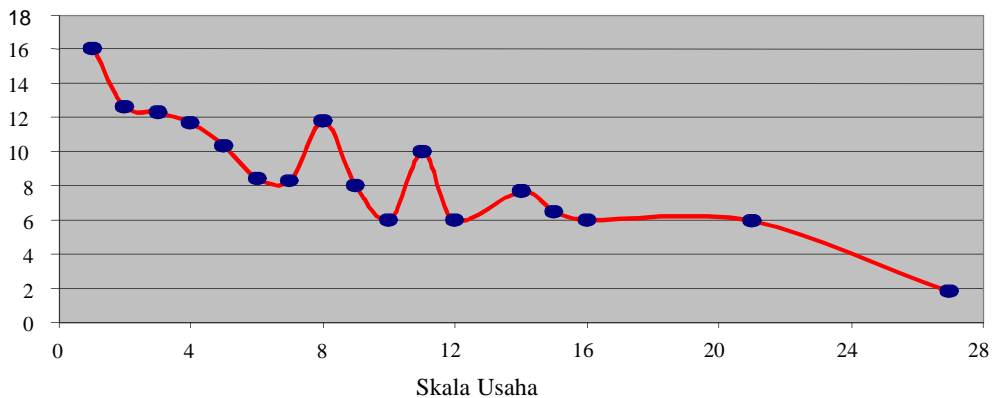
⁴ GKSI. 2000. Perkembangan Koperasi Persusuan dan KUD di Indonesia. Gabungan Koperasi Susu Indonesia. Jakarta.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Peternak dan Pegawai Koperasi

Tahun	Jml Koperasi (bh)	Peternak (org)	Pegawai Koperasi	%Pegawai Per Peternak	Pegawai Per Koperasi
1977	2	296	72	24	36
1980	65	4.169	1267	30	19
1985	182	34.891	6914	20	38
1990	200	62.582	11615	19	58
1995	205	82.871	16062	19	78
2000	231	87.484	17971	21	78
2001	231	88.856	19225	22	83
2002	231	85.999	18830	22	82
Trend (%)	3,6	31,4	29,8		

Sumber : GKSI (2000) data diolah.

Produktivitas yang diraih peternak dalam memelihara sapi perah pada umumnya di bawah 10 liter per hari, sekalipun menggunakan bibit sapi perah unggul; yang sebenarnya mampu memproduksi 15-20 liter per hari. Gambar 2 memperlihatkan suatu kasus hubungan antara produktivitas dengan skala usaha. Terlihat bahwa pada umumnya semakin besar skala usaha semakin lemah manajemen dan semakin rendah penampilan teknologi. Apa yang dapat kita lihat dari Gambar 2 tersebut? Ternyata semakin tinggi skala usaha produktivitas semakin menurun. Teknologi unggul bibit sapi perah tidak memperlihatkan kemampuan optimal karena lemah manajemen yang diterapkan. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam mendapatkan pakan hijauan dan konsentrat terutama karena kesulitan daya beli, lahan bebas yang semakin sempit.



Gambar 2. Produktivitas Sapi Perah Menurut Skala Usaha (l/ek)

STRUKTUR BIAYA SAPI PERAH

Struktur Biaya Koperasi/KUD

Koperasi sapi perah berbeda dengan koperasi biasa karena koperasi sapi perah beranggotakan peternak sapi perah mempunyai anggota sebagai pengusaha dan usahanya itu menunjang kehidupan koperasi. Koperasi yang biasa adalah dimana para anggota menitipkan iuran wajib dan simpanan wajib dan sebagainya sehingga terkumpul modal yang relatif besar. Semakin banyak anggota akan semakin banyak modal terkumpul. Dengan modal terkumpul koperasi dapat membuka suatu usaha dan mendapat keuntungan. Masalahnya adalah bahwa peternak menjadi anggota koperasi atautah usahanya menjadi bagian dari usaha koperasi?

Bentuk koperasi akan mempengaruhi struktur biaya koperasi. Jika peternak menjadi anggota koperasi dan usahanya tidak ada urusan dengan koperasi maka koperasi tidak mempunyai kepentingan dengan usaha anggota. Tetapi jika usahaternak yang menjadi bagian dari usaha koperasi maka tidak dapat tidak struktur biaya koperasi akan lebih kompleks

Ada dua bentuk koperasi sapi perah yakni koperasi monosifikasi yakni hanya fokus pada usaha sapi perah sedangkan koperasi yang lain adalah koperasi diversifikasi yakni koperasi dengan membuka berbagai usaha. Koperasi peternak pada umumnya bersifat diversifikasi tetapi hampir semua biaya aktivitas koperasi tersebut berasal dari pendapatan dari fee penjualan susu peternak. Semakin besar usaha diversifikasi, maka semakin banyak SHU peternak yang digunakan untuk mengembangkan usaha tersebut.

Tabel 3 memperlihatkan struktur biaya koperasi dan berapa kontribusinya untuk koperasi-koperasi di Jabar dan Jatim pada tahun 2001. Sumber data untuk analisis ini adalah hasil pengolahan Laporan Tahunan Anggota Koperasi Susu antara tahun 1995-2000⁵. Terlihat pada Tabel 3 tersebut bahwa lebih dari 70 persen biaya koperasi digunakan untuk membiayai usaha lain yang sering tidak ada hubungannya dengan usaha ternak sapi perah. Upah karyawan dan pengurus koperasi relatif tinggi yakni 4 sampai 8 persen. Pada Tabel 2 telah diperlihatkan bahwa jumlah karyawan koperasi sangat banyak. Setiap koperasi mempekerjakan rata-rata 82 orang dalam tahun 2002. Seharusnya pegawai koperasi cukup 4 orang dan pengurus 5 orang.

Bagaimana kita melihat koperasi sapi perah ini secara ekonomi? Apakah koperasi kita pandang sebagai sebuah perusahaan yang bertujuan memaksimalkan keuntungan dengan mengatasnamakan kesejahteraan anggota yang juga pengusaha? Atautah koperasi hanya sebagai institusi pelayanan dan keberhasilan

⁵ Anonym. 2000. Sapi Perah. Kumpulan Laporan Tahunan Anggota Koperasi Susu di Jawa Timur dan Jawa Barat antara Tahun 1995-2000. Jakarta.

dinilai dari kemajuan usaha sapi perah anggota. Dalam posisi pertama, koperasi menghimpun keuntungan dan mengembangkannya sehingga koperasi menjadi *variabel cost* bagi peternak sedangkan pada posisi kedua koperasi sama sekali biaya variabel tidak menghimpun dana dan sehingga pengeluaran untuk koperasi bersifat *fix cost*. Dalam posisi pertama koperasi mengumpulkan SHU untuk dibagikan sedangkan dalam posisi kedua, koperasi memberikan pelayanan sedemikian rupa sehingga peternak mempunyai SHU yang tinggi.

Tabel 3. Struktur Biaya Koperasi dan Persentase Kontribusi dalam Biaya Produksi (%)

Uraian	Jatim	Jabar
Bangunan	2,73	1,26
Aktivitas organisasi	5,31	3,37
Pajak	0,77	0,24
Penyimpanan susu	4,08	1,69
Pengolahan ternak	0,93	0,19
Biaya produksi susu	-	-
Upah anggota	3,62	0,61
Upah karyawan koperasi	7,04	3,06
Biaya pengurus	1,44	1,00
Transportasi	2,85	1,66
Biaya usaha Lain	71,23	86,92
% Total biaya koperasi	100	100
Total biaya, Rp.000.000	4.390	6.207

Sumber: GKSI (2000) data diolah.

Dalam kondisi pertama. Pemerintah menilai koperasi sebagai sebuah perusahaan dan sebagai sebuah perusahaan maka koperasi mempunyai kecenderungan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Anggota koperasi yang juga adalah pengusaha diciptakan sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa memaksimalkan keuntungan. Karena koperasi mempunyai fungsi dalam struktur hierarki yang lebih tinggi sehingga mudah dapat memaksa peternak menerima harga input, harga output, biaya modal yang telah ditetapkan oleh koperasi.

Tabel 4 memperlihatkan persentase pendapatan dan biaya koperasi. Koperasi sebenarnya memiliki SHU sebesar 13 persen (Jatim). Tetapi yang bisa diberikan kepada peternak sangat kecil yakni 1,4 persen, sedangkan sisanya digunakan untuk membiayai usaha koperasi yang pada umumnya tidak menguntungkan sehingga SHU yang digunakan itu tidak bermanfaat. Kenyataan ini berdasarkan dari buku laporan tahunan koperasi.

Tabel 4. Persentase Pendapatan dan Biaya Koperasi Per Liter Susu Segar, 2001

Uraian	Jatim	Jabar
Pendapatan		
SHU peternak seharusnya	13,06	5,08
SHU yang bisa dibagikan	1,40	0,51
Biaya		
Bangunan	1,05	0,55
Aktivitas organisasi	1,96	1,48
Pajak	0,28	0,09
Penyimpanan ausu	1,54	0,74
Pengolahan ternak	0,35	0,09
Biaya produksi susu oleh peternak	62,99	56,24
Upah anggota	1,33	0,28
Upah karyawan koperasi	2,58	1,34
Biaya pengurus	0,56	0,42
Tranportasi	1,05	0,74
Biaya usaha lain	26,33	38,03
% Total biaya koperasi	100	100

Sumber: GKSI (2000) data diolah.

Dari total pendapatan koperasi, maka sebanyak 62,99 persen (Jatim) digunakan untuk membayar pembelian susu segar dari peternak. Sedangkan 26 persen dari pendapatan itu digunakan kembali untuk membiayai usaha-usaha lain. Ini berarti, dalam biaya per liter susu terdapat 62,9 persen ditanggung peternak dan 37,1 persen merupakan biaya non produksi yakni biaya aktivitas organisasi, upah karyawan, biaya usaha lain dan sebagainya. Struktur biaya ini memperlihatkan bahwa fungsi koperasi telah menyebabkan biaya per liter susu segar tidak efisien. Dengan kata lain, untuk meningkatkan pendapatan peternak, maka biaya koperasi harus ditekan serendah mungkin hingga mencapai 5 persen. Jika ini berhasil maka peternak akan menerima tambahan pendapatan sekitar 13 persen dari harga susu, jadi meningkat 10 persen dari yang biasa mereka terima dan efisiensi meningkat 25 persen. Hal ini dapat dicapai dengan menata kembali paradigma koperasi yang menganggap koperasi adalah perusahaan tersendiri.

Tabel 5 memperlihatkan suatu kasus pembagian SHU dari beberapa koperasi yang dipelajari. Besaran SHU sebesar Rp 2 milyar lebih ternyata hanya 2 persen atau Rp 111 juta yang dapat dibagikan kepada peternak dan sebagian besar digunakan membiayai usaha lain diluar usaha peternakan.

Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji skala usaha melalui fungsi keuntungan Cobb Douglas memberikan kesimpulan bahwa industri koperasi susu berjalan tidak efisien karena manajemen yang tidak sehat, penggunaan faktor produksi tetap tidak memberikan biaya rata-rata yang lebih tinggi dari biaya minimum dengan produksi yang lebih rendah dan terdapat kecenderungan biaya rata-rata itu terus meningkat dengan meningkatnya modal. Ini berarti peningkatan modal akan mendorong aktivitas koperasi semakin tidak efisien, dengan kata lain terjadi lebih banyak pemborosan

Tabel 5. Nilai SHU dan Pembagiannya, 2001 (Kasus Koperasi Susu)

Uraian	Nilai Rp.	%SHU Dibagikan	%SHU Sebenarnya
SHU sebenarnya	2.310.427.436		100
SHU yang dibagikan	111.884.203	100	5
Cadangan koperasi	44.753.681	40	2
SHU untuk peternak	44.753.681	40	2
Pengurus	5.594.210	5	0
Karyawan	5.594.210	5	0
Dana pendidikan karyawan	5.594.210	5	0
Dana sosial karyawan	2.797.105	2	0
Dana pembangunan daerah	2.797.105	2	0

Sumber : GKSI (2000) data diolah.

Struktur Biaya Peternak

Tabel 6 memperlihatkan struktur biaya usaha ternak sapi perah UR. Ternyata biaya memberikan pakan membutuhkan pengeluaran terbesar yakni 62,5 persen. Biaya terbesar kedua adalah biaya bangunan, perawatan dan pembelian alat-alat. Jika biaya penyusutan diabaikan, maka kontribusi biaya pakan mencapai 80 persen sedangkan kontribusi biaya modal 3,8 sampai 7 persen. Dengan demikian ada simpul usaha ternak perah UR untuk diperbaiki sehubungan dengan peningkatan pendapatan yakni biaya pakan, biaya modal dan penyusutan. Menarik adalah justru pengadaan pakan dan modal ditangani oleh koperasi, sehingga sebenarnya koperasi adalah kunci yang dapat membantu meningkatkan pendapatan peternak dengan cara tidak melakukan bisnis dengan anggota koperasi. Hubungan harus dilakukan dalam cara kerjasama.

Tabel 6. Struktur Biaya Produksi Susu Per Liter

Uraian	%
Bibit	3,3
Upah	7,2
Pakan	62,5
Perawatan ternak	1,0
Bangunan	20,6
Biaya modal	3,8
Pemasaran	1,6
Total	100,0

Sumber : GKSI (2000) data diolah.

Penentuan Harga Susu Segar

Harga susu sering tidak ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan tetapi lebih ditentukan oleh harga impor dan mutu susu. Dengan demikian, dapat saja

harga yang ditetapkan tidak menguntungkan bagi peternak sekalipun bagi koperasi tidak masalah karena selalu ada keuntungan. Inilah dasar mengapa koperasi dan peternak tidak harus memposisikan masing-masing sebagai kompetitor atau satu makan yang lain sebaliknya harus bekerjasama.

KESIMPULAN

Berdasarkan diskusi dapat disimpulkan bahwa industri sapi perah Indonesia berada dalam kondisi yang sakit. Hasil pembedahan memperlihatkan bahwa penyakit itu relatif parah dan terjadi pada banyak simpul industri, antara lain:

1. Peternak swasta selama ini terabaikan dan karena itu terhambat dalam perkembangannya. Setelah intervensi pemerintah tidak berlaku lagi dalam pemasaran susu segar dalam negeri, perusahaan swasta mulai berkembang kembali.
2. Pada sisi lain, peternak koperasi tertahan untuk berkembang. Banyak masalah yang dihadapi namun sebagian kunci permasalahan ada pada koperasi. Dengan kata lain, koperasi dapat dalam jangka pendek meningkatkan pendapatan peternak.
3. Koperasi mempunyai paradigma menjadi koperasi sebagai perusahaan, dan bukan koperasi yang melayani perusahaan-perusahaan peternakan sapi perah yang menjadi anggotanya.
4. Industri IPS yang bernuansa monopsoni, memberikan dampak buruk bagi peternak dan koperasi.
5. Kebijakan makro tidak memberikan insentif bagi perusahaan koperasi maupun peternak swasta untuk berkembang.

Kelima kesimpulan di atas menjadi kunci bagi pemecahan masalah pengembangan industri sapi perah di Indonesia.

SARAN

Untuk mencapai cita-cita menciptakan Indonesia sebagai kolam susu, maka tidak ada jalan lain, selain melakukan perbaikan yang menyeluruh terhadap setiap komponen yang terlibat dalam industri agribisnis sapi perah. Berikut ini, makalah ini hanya memberikan beberapa saran kunci kepada beberapa komponen industri yang diperkirakan merupakan simpul pengembangan sapi perah menuju kolam susu. Saran-saran berikut ini merupakan satu cara memperbaiki apa yang sudah ada dan menyarankan apa yang harus dilakukan dengan mengabaikan kenyataan yang ada.

Usaha Swasta, Usaha Menengah dan Usaha Kecil

1. Memberikan kesempatan kepada perusahaan swasta untuk bergerak maju, tanpa ada lagi hambatan yang bersifat pembatasan ruang gerak. Pemerintah meningkatkan pelayanan kemudahan bagi pengembangan investasi termasuk kerjasama pembibitan dengan perusahaan peternakan di luar negeri. Pembebasan pajak dalam segala bentuk perlu diterapkan secara adil dan per tahap sehingga perusahaan swasta dapat bernapas dan berkembang.

GKSI, Koperasi dan Usaha Rakyat

2. Paradigma koperasi haruslah mengalami perubahan. Koperasi dapat saja dianggap sebuah perusahaan, tetapi definisi perusahaan itu harus lebih luas. Dalam konteks koperasi susu dengan anggota spesifik adalah pengusaha sapi perah maka definisi perusahaan adalah usaha-usaha anggota itu dan koperasi berfungsi memberikan pelayanan manajemen input dan output. Paradigma koperasi yang baru adalah meletakkan koperasi sebagai pelayan yang mengandalkan sosial dan keuntungan bersama. Koperasi tidak perlu menjadi besar, cukup konstan tetapi stabil dan usaha anggotanya yang terus tumbuh bertambah besar.
3. Perbaikan industri sapi perah mencakup seluruh simpul agribisnis yakni peternak, koperasi, pemasaran. Perbaikan ditingkat peternak adalah teknologi dan manajemen. Peran Peternakan meningkatkan skala usaha dari 1-5 menjadi 20-40 ekor. Pada tingkat adalah merubah paradigma pemerataan menjadi mendorong peternak berkembang. Peran GKSI di tingkat pusat sebaiknya membangun stasiun pembibitan dengan bantuan dana pemerintah dan bank dan saham-saham koperasi sapi perah di Indonesia. Stasiun ini menjamin, suplai bibit yang berkelanjutan.
4. Dalam menghadapi pasar input bersama maka koperasi harus melakukan pelayanan input seperti penyediaan hijauan dan konsentrat dengan harga pokok kepada peternak. Khususnya di Jawa, lahan pertanian dan penggembalaan telah terbagi-bagi berdasarkan pemilikan, maka koperasi harus melakukan gerakan mengumpulkan hijauan dan rumput melakukan pengawetan sehingga menjamin kebutuhan peternak dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja mencari pakan.
5. Pemerintah tidak dapat berbuat banyak secara langsung karena dibatasi oleh aturan-aturan perdagangan internasional. Pemerintah hanya dapat meningkatkan peningkatan pelayanan dan memproduksi kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung pengembangan produksi sapi perah dalam negeri. Kebijakan-kebijakan itu dapat berupa penyediaan dana pengembangan usaha sapi perah dengan sistem pengembalian dan bunga yang rasional. Kebijakan makro yang mendukung seperti sistem pemerintahan dan sebagainya.